

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SILATRI INDAH
SEBAGAI PENGGERAK DESA BERAN MENJADI DESA YANG MANDIRI DALAM
BIDANG EKONOMI**

Agus Fatkhurohman

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

BUMDES is a village business institution in the economic field that is managed by the community and the Village Government in an effort to strengthen the village economy and the economy of the village community which is formed based on the needs and potential of the village. This study aims to determine the management of BUMDes Silatri Indah and how it contributes to creating an independent village in the economic field. The research method used is a qualitative research with a descriptive approach. With data collection techniques through interviews with informants who are considered capable of providing detailed information about the Management and Contribution of BUMDes Silatri Indah as an independent village mover in the economic field as well as through documentation that can support that information. The results of the study showed that BUMDes Silatri Indah was one of the best BUMDes in Wonosobo Regency, because it was seen from various perspectives, such as good management, smooth business units, orderly administration and being able to contribute to the village. The management process of BUMDes Silatri Indah is going well, this can be proven by planning, organizing and controlling which is not only done internally by BUMDes management but also to business units and business actors. While the contribution of BUMDes Silatri Indah in realizing an independent village in the economic field can be seen through an increase in Village Original Income (PADes) and being able to increase community income through community empowerment. Supporting factors include Natural Resources, Human Resources, Village Government Support and Cooperation with Other Parties. However, there are still obstacles such as people's understanding of BUMDes and related capital.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Management, Contribution

ABSTRAK

BUMDES merupakan sebuah lembaga usaha desa di bidang ekonomi yang dikelola oleh masyarakat beserta Pemerintah Desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan perekonomian masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan BUMDes Silatri Indah serta

bagaimana kontribusi dalam mewujudkan desa yang mandiri dalam bidang ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap mampu memberikan informasi secara detail tentang Pengelolaan dan Kontribusi BUMDes Silatri Indah sebagai penggerak desa yang mandiri dalam bidang ekonomi serta melalui dokumentasi yang dapat mendukung informasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Silatri Indah menjadi salah satu BUMDes terbaik yang ada di Kabupaten Wonosobo, hal tersebut karena dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti pengelolaan yang sudah baik, unit usaha berjalan lancar, administrasi yang tertib serta sudah mampu berkontribusi pada desa. Proses pengelolaan BUMDes Silatri Indah berjalan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan perencanaan, pengorganisasian dan kontrol yang dilakukan tidak hanya kepada internal pengurus BUMDes namun juga kepada unit usaha dan pelaku usaha. Sedangkan kontribusi BUMDes Silatri Indah dalam dalam mewujudkan desa yang mandiri dalam bidang ekonomi dapat dilihat melalui adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Faktor yang mendukung antara lain Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Dukungan Pemerintah Desa dan Kerjasama dengan Pihak Lain. Namun, tetap ada hambatan seperti pemahaman masyarakat tentang BUMDes dan terkait modal.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan, Kontribusi

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu melalui Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan hal tersebut kemudian dirumuskan bagaimana untuk mewujudkan desa yang mampu mandiri secara ekonomi, tidak hanya bagi desanya saja namun juga kepada masyarakat sekitar. Diperlukan analisi potensi-potensi desa yang baik demi mewujudkan desa yang mandiri dan kesejahteraan masyarakat. Karena potensi desa merupakan modal paling utama dalam mewujudkan desa yang mandiri dalam bidang ekonomi. Salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri dalam bidang ekonomi adalah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Disertai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dimana peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan

kebutuhan dan potensi desa. BUMDes diharapkan mampu menjadi alat penggerak perekonomian desa. Yang tidak hanya berpengaruh kepada peningkatan perekonomian desa tetapi juga kepada peningkatan perekonomian masyarakatnya juga. Sehingga pembangunan desa dapat terwujud dengan peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pendirian dan pelaksanaan BUMDes. Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu daerah yang dijuluki kota asri karena secara geografis adanya potensi alam yang melimpah serta termasuk ke dalam daerah pegunungan karena terdapat Gunung Sumbing dan Sindoro. Secara administratif Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 13 kecamatan dan 202 desa. Dari banyaknya desa yang ada 103 desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik itu masih dalam tahap bertumbuh, berkembang maupun maju/berhasil.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, salah satu BUMDes yang pelaksanaan dan pengelolaannya sudah baik dan termasuk dalam BUMDes yang maju/berhasil adalah BUMDes Silatri Indah milik Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Walaupun tidak ada pemeringkatan secara data terkait BUMDes terbaik, namun berdasarkan tiga tahap dan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas menunjukkan bahwa BUMDes Silatri Indah sudah dapat mencaai kriteria yang ditentukan serta telah mencapai tahap BUMDes yang maju/berhasil.

Desa Beran merupakan desa yang terletak di daerah pegunungan sindoro sumbing yang berada di wilayah Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Sebagian besar merupakan daerah perbukitan dengan kondisi tanah yang sangat subur. Selain itu desa beran lokasinya cukup strategis karena menghubungkan jalan alternatif Wonosobo, magelang dan Yogyakarta. Desa beran mempunyai wilayah yang cukup luas dengan potensi yang cukup besar. Desa beran memiliki luas 3,61 km² yang terdiri dari 4 dusun dan 4.369 penduduk. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Desa beran memiliki potensi alam yang cukup melimpah karena berada di daerah pegunungan sindoro sumbing, dimana potensi yang tersedia berupa tanah yang subur sehingga memungkinkan dalam produk pertanian dan perkebunan, selain itu juga terdapat potensi perikanan karena desa ini dilalui salah satu sungai besar yaitu sungai bogowonto dan beberapa sungai kecil di sekitarnya. Kemudian terdapat potensi olahan masyarakat dari hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, juga terdapat rest area dan kolam renang yang menjadi potensi pariwisata desa beran. Serta terdapat potensi budaya yaitu kegiatan merti desa dan nyadran. Potensi-potensi tersebut kemudian dijadikan modal dalam mendirikan BUMDes Silatri Indah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Silatri Indah merupakan sebuah lembaga usaha yang dimiliki oleh desa Beran dan didirikan pada tahun 2002. Dimulai ketika Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Beran ingin menjadikan Beran menjadi desa yang mandiri. Ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu yang terbilang sulit, banyak masyarakat yang hidup miskin dan banyak anak yang putus sekolah. Ketika desa tidak mempunyai inovasi, maka permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan. Sehingga pada saat itu, Pemerintah Desa dan BPD berinovasi untuk dapat mendirikan sebuah badan usaha yang harapannya dapat membantu perekonomian desa maupun perekonomian masyarakat. Setelah Pemerintah Desa dan BPD sepakat untuk bersama-sama mendirikan badan usaha, kemudian diselenggarakan musyawarah desa. Yang kemudian hasilnya menyatakan bahwa Desa Beran akan mendirikan Badan Usaha, walaupun belum ada Undang-Undang Desa yang mengatur tentang BUMDes saat itu. Untuk modal saat itu merupakan penyertaan saham dari masyarakat serta dana dari Pemerintah Desa. Karena memang pada saat itu belum ada bantuan dana dari pemerintah maupun regulasi yang mengatur tentang itu, sehingga dengan modal tersebut, dapat membangun dan mendirikan badan usaha.

Pada awal berdiri tahun 2002, BUMDes Silatri Indah melaksanakan usaha di bidang peternakan dan penggemukan sapi. Modal saat itu berasal dari saham masyarakat sebesar Rp. 12.650.000. Namun satu tahun berjalan, usaha tersebut mengalami kerugian. Hal tersebut dikarenakan fluktuasi harga sapi yang turun drastis pada Tahun 2003. Sehingga, usaha ini mati suri dan memiliki aset berupa sapi 4 ekor yang kemudian dijual dengan harga sekitar Rp. 15.000.000 yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat dan sisanya dimasukkan ke dalam kas desa serta aset kandang sapi yang tidak mempunyai nilai jual. Setelah adanya permasalahan tersebut, BUMDes Silatri Indah berhenti sementara selama 10 tahun sampai ada inovasi dan kebijakan baru, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa. Selama masa vakum 10 tahun tersebut tidak ada aktivitas BUMDes lagi selain adanya analisis mengenai potensi desa yang ada, yang dilaksanakan oleh Direktur BUMDes Bapak Akhmat dan Pemerintah Desa Beran.

Pada tahun 2013, setelah adanya analisis potensi desa dan bantuan modal serta regulasi yang kuat mengatur tentang BUMDes, akhirnya BUMDes Silatri Indah diaktifkan kembali dengan modal dan perencanaan yang lebih kuat serta adanya bantuan modal dari Pemerintah. Modal tersebut sebesar Rp. 23.000.000 yang berasal dari Hibah Pemerintah. Direktur BUMDes yang menjalankannya pun masih sama seperti Tahun 2002 yaitu Bapak Akhmat. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Beran Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Silatri Indah Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Setelah mempersiapkan dengan matang baik secara perencanaan maupun modal, kemudian BUMDes Silatri Indah diaktifkan kembali dengan beberapa unit usaha, yaitu : Rest Area, Pengelolaan Toko, Penyewaan Kios, Pengelolaan Toilet dan Wifi, dan Kolam Renang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada stakeholder yang dianggap mengetahui betul terkait fokus penelitian ini, yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Kepala Desa Beran, Direktur BUMDes Silatri Indah, Pelaku Usaha BUMDes Silatri Indah dan Masyarakat Umum serta melalui dokumentasi untuk mendukung data yang diperoleh.

KERANGKA TEORI

Teori Manajemen Pemerintahan

Pengertian manajemen pemerintahan tidak jauh berbeda dengan manajemen pada umumnya. Menurut Talizudhu Ndraha (2003:159) : Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*“doing right things”*) secara efisien (*doing thing right*). Dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah diciptakan. Teori manajemen merupakan istilah umum yang digunakan secara longgar untuk menunjukkan temuan-temuan riset, kerangka analisis, proporsi, kepercayaan, pandangan, pengamatan dan usulan yang semuanya berusaha menjelaskan bagaimana para pimpinan seharusnya menjalankan pemerintahannya dalam sebuah organisasi atau lembaga. Pembahasan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif artinya adalah bagaimana seluruh proses aktivitas yang dikerjakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik dapat mencapai sasaran yang tepat, yakni berdaya guna. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah yang efektif ini tidak dilepaskan dari persoalan manajemen

pemerintahan. Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik.

Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih berfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan. Selanjutnya dikatakan manajemen pemerintahan menyroti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), serta pengendalian (*controlling*) yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Kemudian setelah diuraikan mengenai manajemen pemerintahan sebagai ilustrasi bagaimana arah penyelenggaraan pemerintah yang efektif sesungguhnya sangat membutuhkan manajemen terutama alat-alat manajemen, teknik manajemen, pengetahuan dan keterampilan manajemen sehingga kebijakan pemerintah yang ditetapkan dapat dengan mudah dijabarkan dalam program tindakan yang langsung dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Teori Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 1 ayat 9 menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan sebuah dasar dalam pembangunan itu sendiri. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan (Raharjo Adisasmita, 2006:3). Disisi lain pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.

Menurut Raharjo Adisasmito (2013:57) menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa dibagi menjadi 2 yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh

bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Selain itu, pembangunan desa tidak hanya diharapkan berdampak bagi desa itu sendiri namun juga pada kelangsungan hidup masyarakat desa. Maka dua program pembangunan desa yang mencakup tujuan dan dampak tersebut adalah (a) Pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur) Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005:61). (b) Pemberdayaan masyarakat Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, Perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005:41). Menurut kodratnya, Manusia tidak dapat hidup menyendiri, Tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia yang lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2004, menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Manikam (2010 : 19) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dari

beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan usaha atau lembaga ekonomi yang berada di desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk dapat menggali kebutuhan dan potensi desa yang ada, sehingga hal tersebut dapat turut berkontribusi dalam pembangunan desa seperti peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu, di dalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni : unit perdagangan, unit jasa keuangan, unit produksi.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan BUMDes Silatri Indah

BUMDes Silatri Indah sebenarnya sudah berdiri sejak Tahun 2002. Dimulai ketika Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Beran ingin menjadikan Beran menjadi desa yang mandiri. Ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu yang terbilang sulit, banyak masyarakat yang hidup miskin dan banyak anak yang putus sekolah. Ketika desa tidak mempunyai inovasi, maka permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan. Sehingga pada saat itu, Pemerintah Desa dan BPD berinovasi untuk dapat mendirikan sebuah badan usaha yang harapannya dapat membantu perekonomian desa maupun perekonomian masyarakat. Pada awal berdiri tahun 2002, BUMDes Silatri Indah melaksanakan usaha di bidang peternakan dan penggemukan sapi. Modal saat itu berasal dari saham masyarakat sebesar Rp. 12.650.000. Namun satu tahun berjalan, usaha tersebut mengalami kerugian. Hal tersebut dikarenakan fluktuasi harga sapi yang turun drastis pada Tahun 2003. Sehingga, usaha ini mati suri dan memiliki aset berupa sapi 4

ekor yang kemudian dijual dengan harga sekitar Rp. 15.000.000 yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat dan sisanya dimasukkan ke dalam kas desa serta aset kandang sapi yang tidak mempunyai nilai jual. Setelah adanya permasalahan tersebut, BUMDes Silatri Indah berhenti sementara selama 10 tahun sampai ada inovasi dan kebijakan baru, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa. Selama masa vakum 10 tahun tersebut tidak ada aktivitas BUMDes lagi selain adanya analisis mengenai potensi desa yang ada, yang dilaksanakan oleh Direktur BUMDes Bapak Akhmat dan Pemerintah Desa Beran.

Pada tahun 2013, setelah adanya analisis potensi desa dan bantuan modal serta regulasi yang kuat mengatur tentang BUMDes, akhirnya BUMDes Silatri Indah diaktifkan kembali dengan modal dan perencanaan yang lebih kuat serta adanya bantuan modal dari Pemerintah. Modal tersebut sebesar Rp. 23.000.000 yang berasal dari Hibah Pemerintah. Direktur BUMDes yang menjalankannya pun masih sama seperti Tahun 2002 yaitu Bapak Akhmat. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Beran Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Silatri Indah Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. .

BUMDes Silatri Indah yang merupakan sebuah organisasi juga mempunyai perencanaan dalam menunjang dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, BUMDes Silatri Indah mempunyai 2 bentuk perencanaan, yaitu saat pertama kali dibentuk tahun 2002 dan saat aktif kembali tahun 2013. Pada tahun 2002 saat pertama kali berdiri, perencanaan BUMDes Silatri Indah masih dalam jangka Perencanaan Pendek (untuk 1 tahun), karena mengingat pada saat itu belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta arahan terkait Program Badan Usaha Milik Desa. Sehingga, pada saat itu perencanaan yang dibuat hanya mencakup satu sampai dua tahun saja. Namun Pemerintah Desa Beran tetap bertekad untuk mendirikan sebuah Badan Usaha yang diharapkan akan membantu perekonomian desa. Setelah perencanaan tahun 2002 telah dibuat, maka Direktur beserta Pengurus BUMDes Silatri Indah mengimplementasikan hasil perencanaan tersebut. Perencanaan Usaha tahun 2002 adalah Usaha Peternakan dan Penggemukan Sapi. Usaha tersebut hanya berjalan sekitar 1 tahun saja.

Tahun 2003 usaha tersebut berhenti karena kurangnya modal, adanya krisis serta perencanaan yang masih belum matang untuk kedepannya. Sehingga, setelah 1 tahun jalan,

BUMDes Silatri Indah berhenti atau mati suri. Kemudian pada tahun 2013, setelah Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 213 ayat 1, maka Pemerintah Desa Beran beserta Pengurus BUMDes Silatri Indah kembali bermusyawarah untuk menentukan rencana kerja yang lebih matang untuk BUMDes Silatri Indah. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Perdes Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Silatri Indah. Dengan bermodalkan dua regulasi tersebut akhirnya Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes Silatri Indah sepakat untuk mengaktifkan kembali BUMDes Silatri Indah yang sempat berhenti dan mati suri sejak tahun 2003.

BUMDes Silatri Indah mempunyai Visi menciptakan desa beran yang mandiri dalam bidang ekonomi. Maka dalam mewujudkan visi tersebut dibutuhkan perencanaan yang matang dan kuat. Perencanaan yang dibuat pun tidak untuk jangka pendek, namun untuk jangka menengah yaitu lima sampai enam tahun kedepan, lebih mudah memprediksi hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Sehingga dapat mengantisipasi dan mencari solusi terbaik agar tidak vakum atau mati suri. Dalam perencanaan tersebut, usaha yang dilaksanakan pada saat awal berdiri yaitu peternakan dan penggemukan sapi tidak lagi dijalankan lagi untuk tahun 2013 kedepan. Setelah dapat memahami betul potensi-potensi yang dapat dikembangkan, kemudian untuk enam tahun kedepan, unit usaha yang direncanakan adalah Bidang Pariwisata, Bidang Perdagangan, Bidang Jasa dan Bidang Edukasi. Namun, tahun 2013 yang dilaksanakan baru dua bidang usaha, yaitu Perdagangan dan Jasa. Dua bidang usaha tersebut yang diharapkan dapat menghidupkan kembali dan menjadi awal kebangkitan BUMDes Silatri Indah.

Dalam segi Pengorganisasian, BUMDes Silatri Indah ini disesuaikan dengan latarbelakang pendidikan dari masing-masing. Secara umum, pengurus BUMDes Silatri Indah adalah lulusan SMA. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghambat keberjalanan organisasi BUMDes Silatri Indah, yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang dapat menggali potensi dari asing-masing pengurus lebih dalam lagi. Sehingga kedepannya, kualitas Sumber Daya Manusia di dalam BUMDes Silatri Indah semakin mumpuni untuk dapat melaksanakan berbagai rencana dan kegiatan BUMDes. Selain itu, BUMDes Silatri Indah mempunyai beberapa unit usaha yang dijalankan sesuai dengan unit bidang yang ada meliputi Bidang Peternakan, Perikanan, Pedagangan, dan Pariwisata. Dalam menjamin keberjalanan sesuai dengan rencana maka diperlukan pengorganisasian atau pengelolaan yang baik di setiap unit usahanya, yaitu : Rest Area, Pengelolaan Toko, Penyewaan Kios, Pengelolaan Toilet dan Wifi, dan Wisata Kolam Renang.

Setelah adanya pengorganisasian, maka masing-masing pengurus BUMDes Silatri Indah sudah mempunyai tanggungjawab untuk dapat memastikan kontrol bahwa pelaksanaan unit usahanya berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan diawal. Terlebih lagi kepada direktur BUMDes, di BUMDes Silatri Indah direktur terbagi menjadi tiga, yaitu Direktur Keuangan yang akan mencatat dan meneliti setiap uang yang masuk dan keluar di BUMDes Silatri Indah, Direktur Administrasi yang mengawasi tentang administrasi setiap waktu dan Direktur Utama mengawasi kinerja dan koreksi dari direktur lainnya. Selain direktur, tentunya juga ada pengurus lain, seperti Badan Pengawas yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja internal pengurus BUMDes Silatri Indah mulai dari administrasi sampai pada konsep yang dibuat bersama. Kemudian ada manajer dan tenaga kerja yang bertanggungjawab mengawasi keadaan di lapangan unit usaha BUMDes, yaitu dengan menarik retribusi biaya sewa kios di Rest Area sampai pada mendengarkan saran dari masyarakat untuk dapat melihat apakah ada penghambat dalam keberjalanan usaha tersebut. Dan ketika terdapat penghambat, maka hal tersebut akan dibawa dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap satu bulan.

Dalam keberjalanan suatu usaha tentunya terdapat berbagai faktor yang mendukung keberhasilan BUMDes Silatri Indah, adapun yang faktor tersebut adalah Sumber Daya (Alam, Manusia, Finansial), Dukungan Pemerintah dan Kerjasama dengan Pihak Swasta. Namun dalam keberjalanannya juga terdapat faktor yang menghambat, faktor tersebut adalah Minimnya pemahaman masyarakat terhadap BUMDes, Permasalahan Permodalan dan Perekrutan Tenaga Kerja.

B. Kontribusi BUMDes Silatri Indah dalam Mewujudkan Desa Beran menjadi Desa yang Mandiri dalam Bidang Ekonomi

Keberhasilan BUMDes Silatri Indah tentunya mempunyai peran yang besar dalam pembangunan desa. Karena tujuan utama pelaksanaan BUMDes Silatri Indah adalah untuk membangun desa beran serta masyarakatnya. Target pembangunan desa adalah sesuatu yang dapat dilihat secara objektif, pembangunan yang jelas dan nyata, yang menjadikan masyarakat desa yang tinggal akan semakin nyaman. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada prakteknya, hasil keuntungan dari BUMDes Silatri Indah diserahkan kepada Desa Beran dalam bentuk PADes, yang kemudian PADes tersebut dialokasikan sesuai dengan APBDes salah satunya adalah di bidang fisik atau

infrastruktur. Sehingga dalam hal ini, kewajiban BUMDes adalah membantu penguatan dalam segi ekonomi, namun secara tidak langsung BUMDes Silatri Indah juga berperan dalam pembangunan bidang fisik atau infrastruktur yaitu dengan keuntungan yang dimasukkan dalam PADes.

BUMDes Silatri Indah tidak berwenang untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur secara mandiri karena itu merupakan wewenang dari Pemerintah Desa Beran. Secara umum pembagian hasil keuntungan BUMDes Silatri Indah adalah 50% masuk ke desa dalam bentuk Pendapatan Asli Desa (PADes), 30% pendapatan Pengurus BUMDes dan 20% masuk kas BUMDes untuk modal selanjutnya. 50% yang dimasukkan ke PADes sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa Beran untuk dapat dialokasikan ke berbagai bidang, salah satunya juga termasuk dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Beran.

Tabel
Pendapatan BUMDes Silatri Indah Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Pendapatan	Pembagian		
			50% ke Desa	30% ke Pengurus	20% ke Modal
1.	2017	Rp. 64.441.000	Rp. 32.220.500	Rp. 19.332.300	Rp. 12.888.200
2.	2018	Rp. 80.795.000	Rp. 40.387.500	Rp. 24.238.500	Rp. 16.159.000
3.	2019	Rp. 101.050.000	Rp. 50.525.000	Rp. 30.315.000	Rp. 20.210.000

Sumber : Wawancara dengan Bapak Akhmat Direktur BUMDes Silatri Indah

Berdasarkan data tersebut, Keuntungan BUMDes diserahkan kepada Desa Beran dalam bentuk PADes, yang kemudian PADes tersebut menambah dana APBDes dan dialokasikan sesuai dengan APBDes salah satunya adalah di bidang fisik atau infrastruktur. Sehingga dalam hal ini, kewajiban BUMDes adalah membantu penguatan perekonomian dalam mewujudkan desa yang mandiri dalam bidang ekonomi, namun secara tidak langsung BUMDes Silatri Indah juga berperan dalam pembangunan bidang fisik atau infrastruktur yaitu dengan keuntungan yang dimasukkan dalam PADes. Setelah itu, BUMDes Silatri Indah tidak berwenang untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur secara mandiri karena itu merupakan wewenang dari Pemerintah Desa Beran

Selain bagi desa, BUMDes juga berperan bagi masyarakat yaitu dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat terwujud karena adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam mencapai kelancaran dan tujuan bersama. Partisipasi masyarakat desa beran tersebut akan terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam

berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes Silatri Indah, baik itu dalam bentuk tenaga, pikiran, materiil maupun moril. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat atau masyarakat yang berdaya maka BUMDes Silatri Indah menjadi wadah yang tepat dalam mencapainya, khususnya kepada ibu rumah tangga yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga dapat berperan menambah pendapatan bagi keluarganya dengan menjadi pelaku usaha di BUMDes Silatri Indah. Dalam keberjalanan BUMDes Silatri Indah, tidak hanya mementingkan pada hasil yang berupa keuntungan saja, tetapi salah satu tujuan lain adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat desa beran. BUMDes silatri Indah tidak hanya berorientasi pada profit melainkan juga memberikan wadah dan kesempatan bagi masyarakat desa beran yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan menjadi pelaku usaha di BUMDes Silatri Indah, selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.

Melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Beran yaitu Pengolahan Hasil Pertanian yang dilaksanakan Bulan Januari 2019 dan Pelatihan Boga yang dilaksanakan pada Bulan Juli 2019 yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Wonosobo. Masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya mengurus rumah sekarang bisa menambah pendapatan keluarga dengan menjadi pelaku usaha di Rest Area dengan mengandalkan kemampuan memasak. Ataupun pemuda yang ada di desa beran yang menganggur juga bisa mendapat penghasilan dengan menjadi karyawan di BUMDes Silatri Indah. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes Silatri Indah adalah melalui sosialisasi dan pemasangan papan informasi. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan turun langsung bertemu dengan masyarakat desa beran dalam kegiatan-kegiatan resmi seperti rapat RT, RW dan PKK yang terdapat di desa beran. Selain itu dalam kegiatan yang informal seperti pada pengajian atau tahlilan rutin yang digelar di desa beran.

Sosialisasi yang diberikan adalah untuk memperkenalkan apa itu BUMDes dan program apa saja yang akan dilaksanakan dan dikembangkan di desa beran. Selain melalui sosialisasi, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui pemasangan baliho atau spanduk di jalan yang ada di desa beran. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat secara keseluruhan dapat melihat dan membaca apa itu BUMDes Silatri Indah. Bahkan ketika ada lowongan pekerjaan di BUMDes juga dapat dipasang di papan informasi tersebut. Dengan adanya sosialisasi dan pemasangan papan informasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes Silatri Indah.

Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya kepada desa beran secara umum saja, namun juga dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi keluarganya, dimana kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Desa Beran merupakan salah satu desa di Kabupaten Wonosobo yang telah mampu mendirikan dan melaksanakan BUMDes mulai tahun 2002, bahkan jauh sebelum adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa, Desa Beran sudah berinisiatif untuk dapat mendirikan sebuah badan usaha yang diharapkan dapat membantu perekonomian desa dan perekonomian masyarakat. Berbagai elemen pun dilibatkan dalam pelaksanaannya, yaitu masyarakat, Pemerintah Desa Beran dan Pengurus BUMDes Silatri Indah baik itu dalam segi musyawarah desa, perencanaan sampai pada monitoring evaluasi. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, kriteria BUMDes ada tiga, yaitu Tumbuh, Berkembang dan Berhasil. Dan BUMDes Silatri Indah ini sudah mencapai kriteria Berhasil dengan berbagai unit usaha yang dilaksanakannya. Hal tersebut sudah banyak pengakuan dari berbagai pihak atas prestasi, pengelolaan dan pengembangan unit usaha di BUMDes Silatri Indah.

Saran

Walaupun sampai saat ini pengelolaan dan pelaksanaan BUMDes Silatri Indah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada dan ditemukan beberapa permasalahan dan penghambat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BUMDes dan faktor keramaian pengunjung di Rest Area membuat Pemerintah Desa Beran dan Pengurus BUMDes Silatri Indah semakin berpikir untuk terus dapat mengembangkan BUMDes menjadi lebih baik lagi. Dengan hal tersebut baik Pemerintah Desa Beran maupun pengurus BUMDes Silatri Indah terus menggenjot proses promosi yang dilakukan, salah satunya dengan pihak swasta. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materiel dalam bentuk dana saja, tetapi juga dapat memberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan peningkatan softskill tidak hanya untuk Perangkat Desa dan Pengurus BUMDes saja, namun untuk ke seluruh elemen yang berhubungan dengan pelaksanaan BUMDes Silatri Indah, seperti masyarakat umum,

masyarakat sebagai pelaku usaha, peternak dan petani. Selain itu, diperlukan juga pelatihan komputerisasi dengan baik, sehingga media dari BUMDes Silatri Indah dapat berjalan dengan baik karena itu sebagai bentuk perwajahan BUMDes dimata publik. Sehingga membutuhkan kemampuan pengelolaan website yang baik untuk menunjang kegiatan promosi di media.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- H.B, Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Irwan, Prasetya. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Jonathan, Sarwono,. 2013. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ndraha, Talidzuhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta : Rineka Cipta.
- Putra, Anom Surya. 2015. *Buku Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- R. Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Graha Aksara.
- Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : PT Grasindo.
- Wijaya, HAW. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : Grafindo Persada.